



ANALISA

3 Januari 2025

Vol. 0008

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi pixel.com/Freepik



**Muhammad
Nurun Najib**

Social Welfare Specialist –
The Reform Initiatives

Diella dan Menteri Akal Imitasi

Dunia dikejutkan kabar dari Albania. Pasalnya, negara kecil di kawasan Balkan tersebut telah mengambil kebijakan yang tidak lazim, menunjuk menteri dari kecerdasan buatan (AI). Diella namanya. Mandatnya tidak lain untuk mengawasi proses pengadaan publik supaya lebih transparan dan akuntabel.

Dengan balutan busana tradisional Albania, Diella bicara dengan nada tenang. Sepintas lalu, apa yang terjadi di Albania menarik ingatan kita pada cuplikan film fiksi ilmiah yang sering diputar di bioskop. Tampak muskil di dunia nyata. Namun, ini benar-benar terjadi. Keberadaan Diella menjadi penanda babak baru sejarah birokrasi modern.

Keputusan Albania lahir dari realitas sosial yang kerap kita jumpai di banyak tempat: keresahan atas praktik birokrasi yang lamban, penuh akan celah korupsi, dan akhirnya membuat warga kehilangan kepercayaan. Diella hadir sebagai jawaban cepat atas keresahan tersebut. Sebuah eksperimen sosial skala besar yang menguji sampai sejauh mana warga bersedia menerima kecerdasan buatan sebagai pengambil keputusan publik.

Dari sini lahir harapan bahwa algoritma bisa membawa birokrasi yang lebih bersih sekaligus kegamangan bahwa negara bisa makin berjarak dengan warganya.

Menguji kecakapan Diella

Kehadiran Diella sebagai salah satu pejabat publik menjadi cermin kesungguhan Pemerintah Albania dalam transformasi birokrasi yang terkenal lamban dan tidak efisien. Mandatnya sebagai Menteri Pengadaan Publik terlihat jelas, di antaranya memastikan setiap tender berjalan transparan, efisien, dan dapat dipantau publik.

Langkah yang diambil Albania ini tampaknya tidak terlepas dari Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang menempatkan Albania dengan skor 42 pada tahun 2024, yang mana artinya ada masalah serius dengan korupsi di negara Balkan tersebut. Maka, kehadiran Diella bisa kita baca sebagai satu langkah maju yang menunjukkan bahwa Albania sungguh-sungguh dalam memerangi korupsi.

Dengan kehadiran AI, setidaknya ada harapan yang terus dipupuk bahwa Diella tidak punya pamrih atas kerja yang dilakukan, pun tidak memiliki hasrat pribadi—yang sering kali menjadi pintu pertama terjadinya praktik korupsi. AI tidak bisa disuap, tidak memiliki jaring kekerabatan, dan juga tidak tergoda dengan keuntungan politik jangka pendek. Aspek ini juga yang menjadi harapan banyak orang atas kehadiran Diella, bahwa dirinya akan menjadi "penjaga gawang" dari praktik-praktik kotor yang selama ini ada dalam tubuh birokrasi.

Namun, di balik semua harapan tersebut, muncul pula bayangan risiko yang tak bisa diabaikan. AI bukanlah makhluk netral yang lahir dari ruang hampa. Algoritmanya dirancang sedemikian rupa dengan bantuan manusia. Artinya, bias, kepentingan, bahkan manipulasi tetap bisa menyusup ke dalam sistem. Maka, jika praktik culas sebelumnya, misalnya, terjadi dengan sogokan amplop, segera saja bisa bertransformasi menjadi korupsi algoritma yang justru lebih sulit dideteksi.

Isu lain yang mungkin segera muncul terkait dengan legitimasi dan akuntabilitas. Lazimnya, seorang pejabat publik bila melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan dituntut hukum. Permasalahannya adalah, bagaimana dengan pejabat publik yang dari AI? Jika saja keputusannya salah atau merugikan publik, siapa yang akan bertanggung jawab? Maka, ruang kosong ini tampaknya juga akan menggerus kepercayaan publik terhadap eksistensi akal imitasi ini ketika berposisi sebagai pejabat publik.

Sementara itu, birokrasi selama ini sering dipandang dingin dan berjarak. Kehadiran menteri AI berpotensi membuat jarak itu semakin lebar karena warga berhadapan dengan avatar virtual yang tidak memiliki empati dan pemahaman terhadap konteks sosial. Jika interaksi dengan negara hanya berupa layar dan kode, bisa timbul rasa bahwa negara semakin kehilangan wajah manusianya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan ikatan sosial yang menjadi fondasi kepercayaan pada demokrasi. Maka, di titik inilah kita perlu melihat lebih jauh, tidak hanya masalah teknis, tetapi juga pada makna sosial dari hadirnya menteri AI.

Refleksi eksistensi AI

Kita tahu, birokrasi sejak asali sering kali digambarkan sebagai mesin yang kaku, penuh aturan, dan sering membuat warga lelah berhadapan dengannya. Kehadiran Diella tampaknya tidak mengurai

masalah tersebut, justru malah mempertebal. Keputusan akan diambil berdasarkan algoritma, tanpa interaksi manusia, dan tanpa ruang empati. Mungkin jangka pendek, ini akan mempersempit praktik korupsi. Namun, sejatinya dalam langkah yang lebih jauh, praktik ini berisiko melahirkan birokrasi yang semakin berjarak dari warga.

Newman, Mintrom, dan O'Neill (2022) dalam jurnal *Digital Technologies, Artificial Intelligence, and Bureaucratic Transformation* mengingatkan bahwa teknologi digital dan kecerdasan buatan tidak serta-merta menghapus birokrasi. Dengan kata lain, AI bisa memperkuat sifat mesin birokrasi ala Weber—impersonal, berbasis aturan, dan serba prosedural. Sisi positifnya, hal ini mendorong prediktabilitas dan mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sisi negatifnya, ketika birokrasi menjadi terlalu mekanis, ia berisiko menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keadilan sosial.

Maka, pada akhirnya, birokrasi bukan sekadar masalah teknis belaka, melainkan jaringan hubungan sosial yang membentuk rasa percaya warga terhadap negara. Artinya, eksperimen Albania mengingatkan kita bahwa teknologi harusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti, dalam menjaga interaksi antara negara dan warganya. Sebab, negara bukan hanya soal aturan yang dijalankan mesin, melainkan juga tentang kehadiran manusia yang mampu mendengar, memahami, dan merespons suara rakyat.